

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan aspek utama dalam pembangunan suatu negara. Tanpa adanya pendidikan suatu bangsa dan negara akan terasa hampa dan tentunya akan tertinggal dengan bangsa lain. Menurut Dendi dkk, pendidikan merupakan suatu hal yang terorganisir, terencana, dan berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk membentuk peserta didik menjadi lebih baik dan memenuhi konsep kehidupan dimana kehidupan seseorang meliputi kedewasaan, bersosialisasi, dan berbudaya.¹

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting untuk dibangun secara merata dan berkualitas oleh suatu negara demi kemajuan dan masa depan negara tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah negara adalah alokasi dana BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) secara merata ke daerah-daerah yang dinaungi oleh negara tersebut. Pendidikan adalah proses terorganisir, terencana, dan berkelanjutan untuk membentuk individu yang lebih baik dalam aspek kedewasaan, sosial, dan budaya. Sebagai pilar utama pembangunan negara, pendidikan perlu dikembangkan secara merata dan berkualitas. Pemerintah mendukung akses pendidikan dengan mengalokasikan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) agar setiap daerah memperoleh kesempatan pendidikan yang setara.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian dan Lembaga Bantuan Operasional Penyelenggaraan rata-rata biaya pelaksanaan

¹ Dendi Herdiansyah and Poni Sukaesih Kurniati, "Pembangunan Sektor Pendidikan Sebagai Penunjang Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Bandung," Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi 8, no. 1 (2020): 2.

pembelajaran.² Dana BOP merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk menyokong operasional dan mengoptimalkan kualitas pendidikan anak usia dini.

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini.³ Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini.⁴

Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas layanan PAUD di Indonesia. Dana bantuan ini memiliki nominal yang jauh lebih besar dibandingkan bantuan lainnya untuk layanan PAUD. Distribusi BOP PAUD juga dilakukan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia, meskipun jumlah nominal yang diterima setiap daerah bervariasi.

Menurut Annisa dkk, penyaluran BOP PAUD berpengaruh signifikan terhadap status akreditasi, di mana peningkatan dana BOP meningkatkan

² Emilda Sulasmi, "Evaluation Of The Operational Assistance Management (BOP) Management Funding Program At The Bengkulu City PAUD Institution," *Journal Of Education and Matematical Science* 1 (2020): 3.

³ "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan," Pub. L. No. 2 (2022),

⁴ "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan," Pub. L. No. 9 (2021), 1, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/175165/permendikbud-no-9-tahun-2021>.

persentase PAUD terakreditasi sekaligus menurunkan jumlah PAUD yang belum terakreditasi, sehingga menunjukkan dampak positif terhadap kualitas lembaga.⁵ Hal ini mencerminkan efektivitas BOP dalam mendorong lembaga PAUD untuk meningkatkan mutu dan memperoleh akreditasi.

Penyaluran dana BOP yang tepat sasaran sangat membantu lembaga PAUD dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Dana ini memungkinkan lembaga untuk memperbaiki fasilitas, memberikan pelatihan bagi tenaga pengajar, dan memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan. Dengan demikian, jumlah PAUD yang terakreditasi meningkat, sementara jumlah PAUD yang belum terakreditasi semakin berkurang.⁶

Pendirian PAUD baru perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah agar memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk sarana prasarana dan tenaga pengajar yang kompeten, serta mencegah pendirian yang hanya bertujuan memperoleh dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), sehingga izin operasional hanya diberikan kepada lembaga yang benar-benar memenuhi persyaratan sesuai aturan pemerintah pusat.⁷

Berdasarkan studi pendahuluan melalui wawancara dengan kepala sekolah dan pengelola dana Bantuan Operasional, diketahui bahwa pelaksanaan dana BOP dimulai dengan perencanaan matang, dari identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana pengadaan, kemudian pengajuan proposal resmi agar program berjalan efektif dan transparan sesuai peraturan.⁸

⁵ Annisa Novita and Sartika Djamaluddin, "Pengaruh Dana Bantuan Operasional Terhadap Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 3–8.

⁶ Dukungan Sumberdaya Air and Asta Cita, "Tantangan Dan Perkembangan PAUD Di Indonesia," *Buletin APBN Vol. IX. Ed*, 2024, 5.

⁷ Yunita Murdianingrum et al., "Efektivitas Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini" (Pusat Penelitian Kebijakan, 2020), 61.

⁸ Reza Aditya Ramadhani et al., "Implementasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Pada Lembaga PAUD," *Abata: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 3, no. 2 (2023): 5.

Pengelolaan dana Bantuan Operasional (BOP) dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosesnya dimulai dengan perencanaan yang matang, termasuk identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana pengadaan, serta pengajuan proposal resmi. Tujuan dari tahapan ini adalah memastikan bahwa penggunaan dana berjalan secara efektif dan transparan, sehingga program yang didanai dapat terlaksana dengan baik sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 menetapkan bahwa penerima BOP PAUD mencakup TK, KB, TPA, SPS, dan PKBM, dengan syarat memiliki NPSN yang terdaftar di Dapodik, memperbarui data sesuai kondisi nyata paling lambat 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya, memiliki izin penyelenggaraan pendidikan yang tercatat di Dapodik, rekening bank atas nama lembaga, serta tidak berstatus sebagai PAUD kerja sama, sementara untuk menerima BOP PAUD kinerja, satuan PAUD harus memenuhi syarat BOP PAUD reguler dan ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak oleh Kemendikbudristek.⁹

Pengelolaan dana BOP PAUD di TK Wahid Hasyim secara bijak telah meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini melalui penyediaan fasilitas seperti APE, bahan pembelajaran, ruang kelas yang nyaman, dan area bermain yang aman dan menarik, sehingga menciptakan lingkungan belajar holistik yang mendukung perkembangan anak, memenuhi kebutuhan murid tanpa membebani orang tua, serta membuktikan bahwa penggunaan dana BOP yang tepat dapat memperkuat kapasitas lembaga pendidikan dalam menyediakan layanan berkualitas bagi generasi penerus bangsa.¹⁰

⁹ Hanne Ayuningtias Elsa Suhendra, Heru Kurniawan, Prima Al Bukhori, Fanisa Dina Amalia Dewi Umbara, *Buku Saku BOP PAUD Tahun 2024*, ed. M. Arif Mukhlishin Hamzah, Alhafiza Putra, R. M. Suryo Donny Putranto (Jakarta, 2024), 15–16.

¹⁰ Rika Amaliah Putri and Achmad Ilyasi, “Implementasi Program BOP PAUD Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Kabupaten Jember,” *Jurnal Paradigma Madani: Ilmu Sosial, Politik Dan Agama* 11, no. 2 (2024): 12.

Berbeda dengan TK Wahid Hasyim yang mengelola dana BOP secara transparan, PAUD Madinah di Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, justru diduga menyalahgunakan dana tersebut akibat kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dalam artikel yang ditulis oleh Syarif Hidayatullah, disebutkan bahwa sejak menerima dana BOP pada 2022 hingga 2024, kepala sekolah tidak memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemilik yayasan, pengurus, maupun tenaga pendidik, sehingga seluruh kebutuhan operasional dibiayai oleh yayasan, bukan dari dana BOP yang semestinya digunakan, sementara lemahnya pengawasan dan dugaan keterlibatan pihak tertentu tanpa transparansi semakin meningkatkan risiko penyalahgunaan anggaran, sehingga diperlukan tindakan tegas dari pihak berwenang agar dana BOP dikelola sesuai peraturan.¹¹

Kajian mengenai dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) diperlukan untuk meninjau efektivitas dan pemanfaatannya dalam meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini. TK Wahid Hasyim mengelola dana BOP dengan baik, sementara PAUD Madinah menghadapi dugaan penyalahgunaan akibat minimnya transparansi. Di Kecamatan Bojonegara, meskipun sebagian PAUD mendapatkan alokasi dana BOP, beberapa PAUD belum menerima bantuan karena kendala belum terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau tidak memenuhi syarat jumlah siswa.

Kecamatan Bojonegara merupakan salah satu wilayah yang mendapatkan alokasi dana BOP untuk PAUD. Alokasi dana BOP ini digunakan untuk berbagai kegiatan pembelajaran, pemenuhan sarana prasarana, pelatihan dan pengembangan guru. Dana BOP bertujuan untuk meningkatkan kualitas lembaga di PAUD. Hal ini dikarenakan, dana digunakan untuk mendukung berbagai aspek dalam proses pembelajaran.

¹¹ Syarif Hidayatullah, "Disdik Seret Paud Madinah Ke Inspektorat Buntut Kasus Dugaan Penyelewengan Dana BOP," *PAKARONLINE*, 2024, <https://pakuanraya.com/disdik-seret-paud-madinah-ke-inspektorat-buntut-kasus-dugaan-penyelewengan-dana-bop/>.

Penggunaan dana BOP berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di PAUD. Dengan adanya dana ini, PAUD dapat menyediakan fasilitas yang lebih baik, seperti ruang kelas yang nyaman, alat peraga edukatif, dan mainan edukasi yang mendukung perkembangan kognitif, motorik, dan sosial anak usia dini. Hal ini akan meningkatkan mutu pendidikan di PAUD, terutama dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak.

Bersamaan dengan pemberian dana BOP, pengawasan yang saksama perlu diadakan. Hal ini dikarenakan, maraknya kasus penyalahgunaan dana BOP, tanpa pengawasan yang efektif, terdapat risiko dana tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini tidak tercapai. Mekanisme pengawasan yang ketat, seperti transparansi dalam pelaporan keuangan dapat mencegah potensi penyalahgunaan. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, dana BOP dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini secara merata.

PAUD BKB HI Al-Hikmah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan sejak awal berdiri. Keberhasilan lembaga ini dalam bertransformasi dari tempat belajar di balai desa menjadi gedung permanen dengan tiga ruang kelas dan satu ruang guru merupakan pencapaian yang membanggakan, namun juga menghadirkan tantangan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sarana yang ada secara berkelanjutan. Pemanfaatan Dana BOP pun memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan, mulai dari pengadaan sarana prasarana, alat peraga, hingga kegiatan pengembangan anak, meski di sisi lain lembaga perlu menjaga transparansi dan akuntabilitas menjelang proses akreditasi tahun 2025. Kualifikasi pendidik pun mengalami peningkatan, dengan sekitar 60% guru telah berlatar belakang pendidikan yang sesuai dengan jenjang PAUD,

namun masih ada 40% guru lainnya yang perlu ditingkatkan kompetensinya melalui beasiswa atau pelatihan lanjutan. Di tengah kemajuan ini, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti kesejahteraan guru yang belum optimal, dengan harapan adanya penyesuaian insentif dan pengangkatan menjadi PNS. Fasilitas penunjang seperti panggung kreasi anak dan ruang tunggu wali murid juga masih terbatas.

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini bertujuan mengkaji kontribusi alokasi dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang disalurkan oleh pemerintah terhadap peningkatan kualitas lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Penelitian ini berfokus pada pengaruh penggunaan dana BOP dalam meningkatkan kualitas lembaga PAUD serta memastikan pemanfaatannya yang optimal. Kajian ini mencakup pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta terciptanya lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi anak-anak.

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana alokasi dana BOP berpengaruh terhadap ketersediaan fasilitas yang mendukung perkembangan anak, seperti ruang kelas yang layak, alat peraga edukatif, serta lingkungan yang kondusif untuk belajar dan bermain. Semua faktor tersebut berperan penting dalam mendukung perkembangan holistik anak usia dini, yang mencakup aspek kognitif, sosial, emosional, dan motorik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lembaga pendidikan anak usia dini yang telah menerima dana BOP dituntut untuk menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan realitas lapangan.

2. Tidak semua lembaga PAUD mampu memanfaatkan dana BOP untuk memperbaiki infrastruktur atau menyediakan alat permainan edukatif (APE) yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini.
3. Belum tersedianya panggung kreasi anak dan ruang tunggu wali murid menunjukkan kurangnya fasilitas pendukung pembelajaran dan kenyamanan interaksi dengan orang tua.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Dana BOP Sesuai Realitas Lapangan
 Penelitian ini menganalisis pemanfaatan dana BOP oleh PAUD BKB HI Al-Hikmah Kecamatan Bojonegara, sesuai ketentuan dan kebutuhan.
2. Pemanfaatan Dana BOP untuk Infrastruktur dan APE
 Fokus penelitian terbatas pada pemanfaatan dana BOP untuk peningkatan infrastruktur dan penyediaan alat permainan edukatif (APE).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan di BKB HI Al-Hikmah Kabupaten Serang?
2. Bagaimana kualitas lembaga PAUD BKB HI Al-Hikmah?
3. Bagaimana pengaruh penggunaan dana BOP terhadap kualitas lembaga PAUD BKB HI Al-Hikmah Kabupaten Serang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) di PAUD BKB HI Al-Hikmah
2. Untuk mengetahui bagaimana kualitas lembaga PAUD BKB HI Al-Hikmah.
3. Untuk menganalisis pengaruh penggunaan dana BOP terhadap kualitas lembaga PAUD BKB HI Al-Hikmah Kecamatan Bojonegara.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Untuk menambahkan khazanah dalam bidang keilmuan, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Anak

Anak dapat belajar dalam lingkungan yang kondusif, dengan fasilitas lengkap dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga, dapat mendorong perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak secara menyeluruh.

b. Bagi Pendidik

Sebagai wawasan penggunaan dana BOP dengan bijak dapat mendukung perkembangan kualitas lembaga PAUD. Hal ini memiliki hubungan erat dengan perkembangan holistik anak usia dini yang sangat berpengaruh pada kehidupan selanjutnya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai

referensi atau dasar bagi penelitian selanjutnya yang membahas pengaruh penggunaan dana BOP terhadap kualitas lembaga PAUD. Dengan kata lain, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi studi berikutnya yang meneliti bagaimana dana BOP berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lembaga PAUD, sehingga dapat memperkaya wawasan dan memperdalam kajian terkait efektivitas penggunaannya.

d. Bagi Lembaga

Penelitian ini memberikan manfaat bagi lembaga PAUD BKB HI Al-Hikmah dalam bentuk evaluasi terhadap pemanfaatan dana BOP yang telah diterima.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima BAB. Diantaranya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan meliputi: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Teoretis meliputi: Kajian Teoretis, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berpikir, dan Pengajuan Hipotesis.

BAB III Metodologi Penelitian meliputi: Jenis Penelitian, Waktu dan Tempat, Metode penelitian, Populasi dan Sampel, Variabel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Hipotesis Statistik.

BAB IV Hasil Penelitian meliputi: Penyajian data dalam bentuk statistik deskriptif, Uji Persyaratan Analisis (hasil pengujian normalitas), Uji Hipotesis, dan Pembahasan.

BAB V Penutup meliputi: Simpulan dan Saran